

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM ATCS (*AREA TRAFFIC CONTROL SYSTEM*) PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

Elena Dwiyanti, Murdiansyah Herman, Sitna Hajar Malawat

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 17120062

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1109127301

Ilmu Administrasi publik, 63201, Fisip, Universitas Islam Kalimantan, 1113059101

Email:

ABSTRAK

Permasalahan transportasi banyak terjadi diperkotaan, salah satunya di kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melakukan upaya dengan mengimplementasikan program *Area Traffic Control System* (ATCS). Akan tetapi implementasi ATCS tidak serta merta mengurangi permasalahan transportasi yang ada.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, display data serta verifikasi dan penegasan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin telah memenuhi faktor komunikasi dan disposisi implementator, Implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin belum memenuhi faktor sumber daya, struktur organisasi dan lingkungan eksternal dan Kendala implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah kurangnya staf pelaksana, perbaikan fasilitas ATCS yang lambat dan ketidakstabilan listrik.

Kata kunci: Implementasi, ATCS (*Area Traffic Control System*)

ABSTRACT

Many transportation problems occur in urban areas, one of which is in Banjarmasin. The city Government of Banjarmasin through the Banjarmasin City Transportation Service made efforts by implementing the Area Traffic Control System (ATCS) program. However, the implementation of ATCS does not necessarily reduce the existing transportation problems.

The research method uses a qualitative approach with a descriptive type of research. Data was collected using interview and documentation methods. Data analysis was carried out by collecting data, reducing data, displaying data and verifying and confirming conclusions.

The results showed that the implementation of the Area Traffic Control System (ATCS) program policy at the Banjarmasin City Transportation Service had met the communication factors and the disposition of the implementer. the external environment and the obstacles to implementing the Area Traffic Control System (ATCS) program policy at the Banjarmasin City Transportation Service are the lack of implementing staff, slow repair of ATCS facilities and electricity instability.

Keywords: Implementation, ATCS (Area Traffic Control System)

PENDAHULUAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam bidang lalu lintas jalan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi

Kalimantan Selatan hal tersebut diatas disebabkan oleh tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah sepeda motor dengan perkembangan ruas jalan sebagai penunjang

transportasi (Tim Penyusun Laporan: 2016, 36). Fasilitas lalu lintas yang tersedia pun juga tidak dipergunakan secara optimal. Selain itu, kesadaran masyarakat atas kedisiplinan dalam berlalu lintas juga belumlah tinggi.

Hal ini pula yang mendorong pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagai pelaksana melakukan gebrakan dan inovasi baru untuk mengurangi permasalahan transportasi melalui program ATCS (*Area Traffic Control System*). Pelaksana program ATCS di Kota Banjarmasin adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin bahwa Dinas Perhubungan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Seperti halnya program-program yang terkadang menemui kendala, implementasi program ATCS inipun tidak terhindar dari berbagai macam kendala. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan secara langsung pada bulan Juni tahun 2021 di jalan yang terdapat kamera CCTV yang terintegrasi dengan ATCS, salah satunya di simpang 3 pal 6, masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, baik itu pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4.

Menurut Udoji dalam Wahab (2004: 64) pelaksanaan suatu kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya sekedar suatu impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program pemerintah harus diimplementasikan agar tidak berakhir sebagai wacana dan implementasi program

tersebut dapat menghasilkan manfaat bagi banyak orang.

Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu unsur dari program ATCS, yaitu sumber-sumber yang dapat dialokasikan, tidak terpenuhi dengan baik. Maka penulis ingin melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program ATCS (*Area Traffic Control System*) pada Dinas Perhubungan kota Banjarmasin.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin?
2. Apa faktor kendala dalam implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

METODE PENELITIAN

• Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata,

gambar, bukan angka-angka (Danim, 2002:51). Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi program *Area Traffic Control System* (ATCS) secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut.

- **Teknik Pengumpulan Data**

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2002: 134) adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam bendayang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Moleong, 2007: 135). Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerjasama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang

sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait implementasi *Area Traffic Control System* (ATCS) di Kota Banjarmasin.

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2002: 149) Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait implementasi ATCS di Kota Banjarmasin.

- **Definisi Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu implementasi dan *Area Traffic Control System* (ATCS). Definisi kedua variabel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan (Mulyadi, 2015: 12).

2. *Area Traffic Control System* (ATCS)

ATCS adalah suatu sistem pengendalian simpang lalu lintas jalan raya dengan menggunakan lampu lalu lintas (*traffic light*) dimana pengaturan lampu lalu lintas pada

masing-masing simpang saling terkoordinasi, sehingga pengguna jalan mendapatkan tundaan yang minimum.

- **Teknik Analisis Data**

Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
3. Display Data
Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)
Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan penarikan kesimpulan

terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinnya saja. Berdasarkan keterangan di atas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Seluruh pendanaan implementasi kebijakan program ATCS pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin didapat dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. ATCS dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin bekerjasama dengan beberapa instansi terkait lainnya yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup serta Kepolisian setempat. Pendanaan yang diberikan oleh Kemenhub kemudian direalisasikan untuk gedung yang dikhususkan untuk program ATCS, sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan ATCS serta untuk staf pelaksana ATCS. Fasilitas pendukung pelaksanaan ATCS di kota Banjarmasin diyakini telah mencukupi.

Fasilitas-fasilitas tersebut hanya membutuhkan pengembangan untuk mengoptimalkan fungsi ATCS.

Selain sarana dan prasarana sebagai fasilitas pendukung pelaksanaan program ATCS, sumber daya manusia pun diperlukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin lah yang berwenang dalam penentuan staf pelaksana ATCS. Staf pelaksana ATCS berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan dari non-aparatur yang memiliki keahlian TI (Teknologi Informasi). Para ASN dan non-aparatur haruslah sesuai dengan kriteria untuk menjadi staf pelaksana ATCS. Kriteria utama adalah klasifikasi pendidikan, etos kerja dan loyalitas. Kemudian para staf yang memenuhi persyaratan tersebut mengikuti pelatihan sebelum benar-benar melaksanakan tugas sebagai pelaksana ATCS.

Selama pelaksanaan program ATCS, para staf pun tetap mengikuti pelatihan yang berkelanjutan berkaitan dengan program ATCS berupa diklat dan seminar. Pembagian tugas diantara para staf disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Kemudian para pelaksana program ATCS bertanggungjawab untuk melaporkan hasil kerja pada Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas.

Berdasarkan hasil wawancara, implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System* dipercaya memberikan pengaruh yang besar terhadap lalu lintas. Hal ini dikarenakan ketika terjadi kemacetan, hal tersebut dapat diintervensi secara langsung dari kantor ATCS dengan mengatur lalu lintas tanpa harus langsung ke tempat kemacetan. Intervensi ini dilakukan dengan mengatur nyala lampu lalu lintas dan

member arahan pada masyarakat melalui pengeras suara.

Area Traffic Control System (ATCS) di kota Banjarmasin sudah terpasang di 13 titik simpang rawan kemacetan. Simpang-simpang tersebut adalah Simpang 3 Pal 6, Simpang 4 Flyover, Simpang 3 Mahaji, Simpang 3 Kuripan, Simpang 3 Kolonel Sugiono, Simpang 4 Antasari, Simpang 4 Merdeka, Simpang 4 Mentari, Simpang 5 Kamboja, Simpang 3 Tower PDAM, Simpang 4 Tarakan, Simpang 4 Belitung, dan Simpang 3 Tulip. Pemilihan simpang-simpang tersebut berdasarkan tingkat kepadatan lalu-lintas.

Implementasi kebijakan program ATCS sudah berjalan selama setahun, akan tetapi pelanggaran tetap dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran yang paling banyak terekam kamera pengawas ATCS adalah tidak memakai helm, menggunakan helm dengan tidak benar, serta melanggar marka jalan dan rambu lalu lintas. Oleh karena itu, pelaksana ATCS bekerjasama dengan kepolisian untuk mengeluarkan surat tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement* ELTE) untuk masyarakat yang kepadatan melakukan pelanggaran.

Salah satu kelebihan yang paling dirasa manfaatnya adalah pelaksana program ATCS dapat memantau lalu lintas melalui kamera CCTV secara langsung. Akan tetapi, program ATCS juga memiliki kekurangan. ATCS di kota Banjarmasin belum bisa mengkoordinasikan kamera pengawas ATCS pada titik-titik simpang satu dengan simpang lainnya. Selain itu, perbaikan kerusakan pada kamera pengawas tidak dapat dilakukan dalam waktu satu hari sehingga mengganggu kinerja ATCS.

Pembahasan

Implementasi kebijakan sebuah program dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan indikator-indikator yang terdapat pada pembahasan landasan teori, ada lima faktor yang mempengaruhi

implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumberdaya, kecenderungan/disposisi implementor, struktur birokrasi dan lingkungan eksternal yaitu lingkungan sosial dan ekonomi.

a. Komunikasi

Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Dinas Perhubungan Banjarmasin dilakukan dengan komunikasi yang cukup baik antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Banjarmasin, dalam hal ini Dinas Perhubungan sebagai pelaksana program. Sebelum mengimplementasikan program ATCS, perencanaan telah dilaksanakan selama 4 tahun.

Kementerian Perhubungan sebagai penggagas program ATCS menuangkan kebijakan tentang implementasi ATCS dalam Arah Kebijakan Rencana Strategis 2015-2019. Kemudian oleh Pemerintah Kota Banjarmasin mengeluarkan peraturan Walikota yaitu perwali nomor 117 tahun 2016 khusus tentang tugas dan wewenang Dinas Perhubungan, termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas salah satunya dengan ATCS. Hal ini menunjukkan komunikasi yang berkesinambungan dalam implementasi kebijakan program ATCS.

Komunikasi yang terjalin antara instansi yang terkait dalam implementasi kebijakan program ATCS sudah cukup baik. Transmisi kebijakan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kota

Banjarmasin sudah sangat baik. Pemerintah Kota Banjarmasin pun memiliki konsistensi dalam implementasi ATCS. Selain itu petunjuk-petunjuk dalam implementasi ATCS pun dirasa sudah cukup jelas oleh pelaksana ATCS.

Komunikasi yang terjalin antara instansi yang terkait dalam implementasi kebijakan program ATCS sudah cukup baik. transmisi kebijakan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Kota Banjarmasin sudah sangat baik. Pemerintah Kota Banjarmasin pun memiliki konsistensi dalam implementasi ATCS. Selain itu petunjuk-petunjuk dalam implementasi ATCS pun dirasa sudah cukup jelas oleh pelaksana ATCS.

b. Sumberdaya

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber-sumber tersebut adalah staf, informasi, wewenang dan fasilitas.

1. Staf

Dalam implementasi kebijakan harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan. Staf pelaksana ATCS pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin direkrut dari ASN dan juga non-aparatur. Seluruh staf pelaksana ditentukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin secara langsung dengan memenuhi persyaratan tertentu. Staf pelaksana haruslah sesuai antara jumlah staf dengan tugas yang dikerjakan. Pada tahap perencanaan dan awal pelaksanaan ATCS, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mengalami kendala pada jumlah staf yang dimiliki. seiring berjalannya

waktu, kekurangan jumlah staf tersebut dapat ditangani.

2. Informasi

Informasi tentang bagaimana implementasi kebijakan program ATCS harus relevan dan memadai. Sejauh ini, staf pelaksana ATCS di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin telah diberikan informasi yang baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelatihan yang terus menerus didapatkan, baik sebelum implementasi kebijakan maupun setelah kebijakan diimplementasikan. Informasi implementasi program ATCS diperoleh dari berbagai macam diklat dan seminar.

3. Wewenang

Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Staf pelaksana ATCS mendapatkan wewenang secara penuh untuk implementasi kebijakan program ATCS. Pelaksana program ATCS bertanggungjawab penuh atas ATCS dan berkewajiban untuk memberikan laporan kepada Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas sebagai bidang yang membawahi ATCS.

4. Fasilitas

Fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan meliputi : dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Fasilitas yang didapatkan oleh Dinas Perhubungan Kota

Banjarmasin untuk implementasi kebijakan program ATCS sudah memadai. Dana yang diberikan mencakup biaya operasionalisasi kantor ATCS, Kamera Pengawas, Pengeras Suara dan sarana prasarana pendukung lainnya.

c. Disposisi Implementator

Disposisi ini diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan. Hal-hal yang penting dalam disposisi implementor antara lain sikap pelaksana, tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif. Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan program ATCS ini cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari diperbanyaknya jumlah titik-titik pemasangan kamera pengawas dari awal pelaksanaan ATCS sampai dengan sekarang yang telah memiliki 19 titik ATCS. Ini menunjukkan bahwa pelaksana memiliki keinginan yang kuat untuk mensukseskan implementasi kebijakan program.

d. Struktur Birokrasi

Hal-hal yang penting dalam struktur birokrasi antara lain efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan. Sayangnya, responden tidak menjelaskan secara rinci tentang struktur organisasi, pembagian kerja dan koordinasi. Responden hanya menyampaikan bahwa para staf pelaksana melakukan tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh para petinggi, dalam hal ini Kepala Bidang Rekayasa Lalu Lintas. Responden juga menjelaskan standar keberhasilan implementasi kebijakan program ATCS adalah kemampuan pelaksana untuk mengatasi kemacetan di persimpangan dengan cepat.

e. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal ini meliputi lingkungan sosial dan ekonomi. Faktor ini mencakup kondisi lingkungan yang

dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Masyarakat Banjarmasin antusias dengan implementasi kebijakan program ATCS. Akan tetapi, antusiasme mereka tidak dibarengi dengan kepatuhan berlalu lintas yang baik. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat di simpang-simpang yang terdapat kamera ATCS.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan program ATCS pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin jika dilihat dari beberapa faktor keberhasilan implementasi, belum terlaksana secara efektif. Hal ini dikarenakan dari lima faktor tersebut diatas, implemementasi program ATCS di kota Banjarmasin hanya memenuhi dua faktor keberhasilan implementasi, yaitu faktor komunikasi dan disposisi implementator. Kedua faktor tersebut terpenuhi karena adanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Adapun faktor yang kurang terpenuhi adalah faktor yang sangat berpengaruh langsung terhadap implementasi ATCS (*Area Traffic Control System*) sumber daya, struktur birokrasi dan lingkungan sekitar. Fungsi ATCS pun belum terlaksana dengan maksimal, hal ini disebabkan masih sering terjadi kemacetan dan masyarakat pun masih melakukan banyak pelanggaran.

Sumberdaya dalam implementasi mencakup beberapa hal yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas. dalam implementasi ATCS pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, mengalami kekurangan pada sumberdaya staf dan fasilitas. Sumber daya dalam implementasi kebijakan program ATCS yang mengalami kendala adalah pada sumber daya manusia, yaitu staf pelaksana dan pada fasilitas pendukung

implementasi. Walaupun seiring berjalannya waktu staf pelaksana ATCS bertambah, akan tetapi hal tersebut tetap tidak sesuai dengan jumlah simpang yang terpasang kamera pengawas ATCS. Selain itu, fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pun tidak dapat bekerja dengan maksimal.

Pada tahapan awal implementasi kebijakan program ATCS ini, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya staf yang dapat mengoperasikan ATCS. kemudian masalah ini terselesaikan dengan mengikutsertakan para staf pada seminar dan pelatihan yang berkaitan dengan ATCS. masalah lain yang muncul setelah itu adalah ketidakseimbangan jumlah staf dan kamera pengawas ATCS yang dimiliki. staf pelaksana ATCS seharusnya memiliki tugas dan wewenang yang jelas, baik itu untuk operator kamera pengawas ataupun teknisi. akan tetapi, terkadang para staf bisa melakukan tugas yang tidak sesuai dengan keahliannya dikarenakan kekurangan staf.

Selain itu, kurangnya staf yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin berdampak pada penyelesaian permasalahan terkait kerusakan baik pada jaringan kamera pengawas ATCS ataupun kerusakan di lapangan. Perbaikan yang dilakukan oleh staf pelaksana ATCS memerlukan waktu yang cukup lama. Satu kali perbaikan pada kerusakan di lapangan dilakukan dengan pengerjaan selama dua hari atau lebih. Hal ini pada akhirnya menghambat optimalisasi implementasi ATCS itu sendiri. Selain itu, permasalahan jaringan nampaknya sangat sering terjadi dan masih belum diperbaiki. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa kamera pengawas yang tidak bisa diakses langsung oleh masyarakat serta website

resmi ATCS yang bahkan tidak bisa diakses sampai dengan sekarang.

Sumberdaya lainnya yang juga memiliki kelemahan adalah sumberdaya fasilitas. fasilitas pendukung implementasi ATCS diakui Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sudah memadai, akan tetapi di lapangan masih terdapat banyak sekali kekurangan. beberapa fasilitas yang sering mengalami kerusakan adalah kamera pengawas, pengeras suara serta listrik. Kamera pengawas dan pengeras suara yang ada di simpang-simpang yang terpasang ATCS seringkali mengalami kerusakan. Kamera pengawas banyak yang mati dan pengeras suara yang tidak berfungsi. selain karena mengalami kerusakan, hal ini juga terjadi karena ketidakstabilan listrik. tentu saja hal ini mengurangi efektifitas implementasi ATCS.

Selain permasalahan sumberdaya, faktor lain yang belum terpenuhi pada implementasi kebijakan program ATCS pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi untuk ATCS tidak digambarkan dengan rinci oleh responden ketika penulis melakukan wawancara. Sehingga penulisa tidak mengetahui siapa yang menjadi penanggung jawab pelaksana ATCS dan juga susunan jajaran pelaksana Program ATCS Responden hanya mengatakan bahwa pelaksana ATCS berada dibawah kewenangan Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Bidang Lalu Lintas Jalan.

Faktor lain yang belum terpenuhi dalam implementasi ATCS di Kota Banjarmasin adalah Lingkungan Sekitar. antusiasme warga terhadap implementasi kebijakan program ATCS tidak lantas mengurangi pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas. masih saja terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan oleh

masyarakat. pelanggaran tersebut antara lain adalah tidak mematuhi rambu lalu lintas, melanggar marka jalan dan tidak menggunakan helm dengan baik dan benar. Maka dapat dikatakan bahwa Implementasi Kebijakan Program ATCS pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin belum efektif sehinggakan masih memerlukan beberapa perbaikan guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

KESIMPULAN & SARAN

• Kesimpulan

Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Sekaligus untuk menjawab permasalahan di awal, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin telah memenuhi faktor komunikasi dan disposisi implementator.
2. Implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin belum memenuhi faktor sumber daya, struktur organisasi dan lingkungan eksternal.
3. Kendala implementasi kebijakan program *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah kurangnya staf pelaksana, perbaikan fasilitas ATCS yang lambat dan ketidakstabilan listrik.

• Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, terdapat beberapa saran yang dapat penulis usulkan, diantaranya:

1. Perlu melakukan perbaikan dan pengembangan pada sumber daya, struktur organisasi dan lingkungan eksternal untuk mendukung implementasi kebijakan program ATCS

- pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang optimal.
2. Perlu adanya penambahan staf pelaksana ATCS pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan percepatan perbaikan fasilitas pendukung ATCS Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin
 3. Perlu adanya sumber kelistrikan yang memadai sehingga implementasi kebijakan program ATCS tidak terhambat oleh ketidakstabilan kelistrikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Alam, D Fahrul, dkk. 2020. Implementasi *Area Traffic Control System* dalam Konteks Kepatuhan Berlalu Lintas di kota Serang. Vol. 2. No. 1. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya*. 2622-9862
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CVPustaka Setia
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2013). ATCS di Beberapa Provinsi dan Kota di Indonesia. Diakses dari <http://hubdat.dephub.go.id/berita/112-2-atcs-di-beberapa-provinsi-dan-kota-di-indonesia>, diakses pada tanggal 25 April 2021 jam 14.00
- Mamentu, S Samuel, dkk. 2019. Evaluasi Penerapan *Area Traffic Control System* (ATCS) pada Simpang Bersinyal. Vol.7. No. 2. *Jurnal Sipil Statistik*. 2337-6732
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2016-2021 Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
- Subianto, Agus. 2012. *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Surabaya: Brilliant.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Suryahadi, Asep dan Sumarto. “Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia.” *Smeru Newsletter*, No.03, Mei – Juni.2001.
- Viki Setiawan Rambe, 2019. Peran Dinas Sosial Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kelurahan Saentis Kabupaten Deli Serdang. (Sumatera Utara : Skripsi Universitas Islam Negeri)
- Wati, Hikmah. 2016. “Peran Dinas Sosial Dalam penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan perkotaan di Provinsi Lampung”. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Zamzam, 2018, Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru